



e-Modul

SEJARAH INDONESIA



XII



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
2019



Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal

Penyusun :

Dias Anjar Malintan, S.Pd
SMA Negeri 1 Cileungsi

Reviewer :

Validator :

bima Perkasa Putra Puji Irianto, S.Hum, S.Pd



Daftar Isi

Daftar Isi

Penyusun

Peta Konsep

Glosarium

Pendahuluan

Identitas Modul

Kompetensi Dasar

Deskripsi

Petunjuk Penggunaan Modul

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

1. Tujuan

2. Uraian Materi

3. Rangkuman

4. Latihan Essay

5. Latihan Pilihan Ganda

6. Penilaian Diri

Evaluasi

Daftar Pustaka

Glosarium

Demokrasi : pemerintahan di tangan rakyat

Demokrasi liberal : demokrasi bebas oleh partai-partai, demokrasi yang ditandai dengan banyaknya partai politik, sistem pemerintahan yang dipegang oleh kaum politisi yang duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat

Partai politik : struktur kelembagaan yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai dan cita-cita yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya



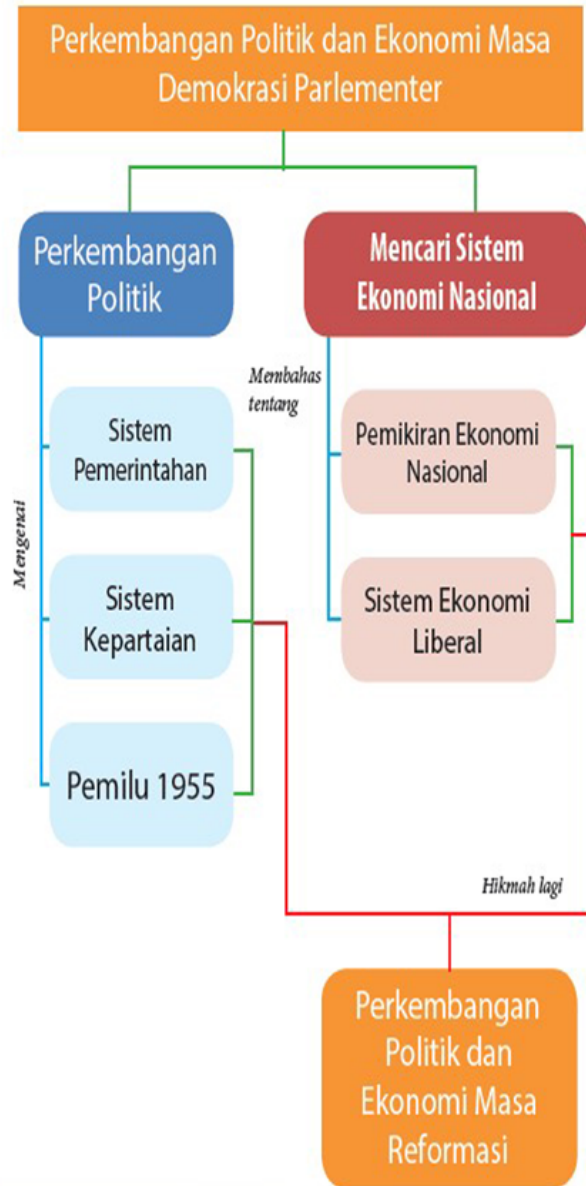
Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peta Konsep

Peta Konsep



sumber:
www.google.com



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pendahuluan

IDENTITAS MODUL

Nama Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia

Kelas / Semester / Alokasi : XII / 1 (Satu) / 2 JP

Waktu

Judul eModul : Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal

KOMPETENSI DASAR

3.3 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal.

3.3.1 Menjelaskan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

3.3.2 Mengklasifikasi informasi tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal.

3.3.3 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal.

4.1 Merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.

- 4.1.1 Merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal.
- 4.1.2 Menyajikan hasil rekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal.

DESKRIPSI

Dalam modul ini akan dipelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan politik dan ekonomi Masa Liberalisme.

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

- Modul ini berisi kegiatan-kegiatan belajar yang dikemas dengan paparan yang memuat uraian materi, latihan, rangkuman, dan penilaian diri. Tiap bagian tersebut memiliki tujuan tersendiri yang pada umumnya merupakan langkah awal (persiapan) bagi kegiatan selanjutnya. Modul ini dapat kalian pelajari dalam waktu antara 3 sampai 4 jam pelajaran
- Pada bagian **URAIAN MATERI**, merupakan sejumlah pengetahuan yang kalian butuhkan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang diorganisasikan dalam satu satuan aktivitas belajar dalam rangka mempermudah kalian menguasai kompetensi yang diharapkan.

- Pada bagian LATIHAN, kalian melakukan kegiatan atau tugas untuk memperkuat atau memperdalam penguasaan kompetensi yang diharapkan.
- Pada bagian RANGKUMAN, kalian mendapatkan informasi tentang garis besar materi pada kegiatan belajar yang baru saja Anda pelajari.
- Kegiatan PENILAIAN DIRI dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kalian telah menguasai materi dan keterampilan yang kalian telah pelajari.
- Pada bagian akhir dari modul ini disiapkan TES AKHIR yang dapat kalian gunakan untuk menguji kemampuan kalian apakah sudah menguasai kompetensi yang diharapkan atau belum, caranya cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang ada. Diharapkan kalian secara jujur melakukan kegiatan ini dari awal sampai akhir.

"Pendidikan setingkat dengan olahraga dimana memungkinkan setiap orang untuk bersaing" – **Joyce Meyer**

"Sekolah maupun kuliah tidak mengajarkan apa yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Mereka mengajarkan kita cara berpikir logis, analitis dan praktis." – **Azis White**.

MATERI PEMBELAJARAN

Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi masa Demokrasi Liberal



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kegiatan Pembelajaran

1. TUJUAN

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan dapat:

1. Menganalisis perjuangan kembali ke negara kesatuan
2. Mengidentifikasi kehidupan politik masa demokrasi liberal
3. Mendeskripsikan Pemilu 1955
4. Menjelaskan perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa Demokrasi Liberal 1950-1959
5. Menganalisis sistem kepartaian yang berlangsung pada masa Demokrasi Liberal.
6. Membandingkan pelaksanaan Pemilu pada masa Demokrasi Liberal dengan pemilu pada masa Reformasi.
7. Menjelaskan kebijakan dan sistem ekonomi pada masa Demokrasi Liberal



Gambar :

" Setitik embun dapat melembabkan daun daunan, sederas hujan dapat membahasi daun beserta dahannya sungguh ilmu yang kamu dapat pada kami bagaikan hujan deras yang tak pernah berhenti membahasi kami. kami tumbuh dan berkembang dan selanjutnya memekari seluruh sekitar kami dan akhirnya membuat mahluk ciptaan Tuhan menjadi bahagia dengan keberadaan kami. Terima kasih telah menjadi hujan deras buat otak dan akhlak kami.

2. URAIAN MATERI

2.1. Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Sebab demokrasi saat ini di sebut – sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu Negara. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki banyak pengalaman tentang demokrasi . Sudah ada tiga jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia, yaitu Presidensial, Terpimpin dan Parlementer. Dari ketiga jenis demokrasi itu yang menjadi pembuka lembaran sejarah Indonesia adalah demokrasi parlementer yang dimulai sejak tanggal 14 November 1945 sampai dengan 5 Juli 1959.

Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini

bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Ciri-ciri demokrasi liberal adalah sebagai berikut:

1. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat
2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah
3. Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR
4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden

Pengertian berbagai Demokrasi:

A. Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak Negara

B. Demokrasi Parlementer

Demokrasi parlementer (liberal) adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana

Menteri . Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen . Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala Negara . Demokrasi liberal dikenal pula sebagai demokrasi parlementer karena pada saat itu berlangsung pemerintahan parlementer .

2.2. Sistem Pemerintahan

A. Kabinet NATSIR (6 September 1950-1921 Maret 1951)

Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir dari partai masyumi sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin Masyumi, di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta, karena tidak diberi kedudukan yang sesuai.

Kabinet ini merupakan kabinet dimana tokoh-tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asaat, Ir. Djuanda, dan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, sehingga kabinet ini merupakan Zaken Kabinet (Kabinet yang diisi oleh kalangan profesional atau kabinet yang sangat ahli di bidangnya dan bukan berdasarkan pada representatif dari Partai Politik)Program – program dari Kabinet Natsir, di antaranya meliputi:

- Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
- Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan
- Menyempurnakan organisasi angkatan perang
- Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat

- Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Keberhasilan yang pernah dicapai Kabinet Natsir :

- Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional
- Menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia
- Indonesia masuk PBB
- Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

- Pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran.
- Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan).
- Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.

Berakhirnya kekuasaan kabinet Natsir :

Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir dikarenakan kegagalan Kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari partai PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui

parlemen sehingga Kabinet Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

B. Kabinet SUKIMAN (27 April 1951-3 April 1952)

Setelah jatuhnya kabinet Natsir, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojokusastro (PNI) dan Soekiman Wijosandjojo (Masyumi) sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Sukiman (Masyumi) – Suwirjo (PNI) yang dipimpin oleh Sukiman.

Adapun program-program Kabinet Sukiman sebagai berikut:

- Bidang keamanan, menjalankan tindakan – tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
- Bidang sosial – ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Juga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha.
- Di bidang politik luar negeri: menjalankan politik luar negeri secara bebas – aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya..
- Di bidang hukum, menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.
- Mempercepat persiapan – persiapan pemilihan umum

Hasil yang dicapai:

Tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Kabinet Natsir. Hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

Kedala/Masalah yang dihadapi:

- Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.
- Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.
- Masalah Irian barat belum juga teratasi.
- Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.

Berakhirnya kekuasaan Kabinet:

Kejatuhan Kabinet Soekiman merupakan akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act (MSA). Peretujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki Blok Barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

C. KABINET WILOPO (3 April 1952- 3 Juni 1953)

Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojokusarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur, namun gagal. Kemudian menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo, sehingga terbentuklah Kabinet Wilopo. Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya.

Program Kabinet Wilopo antara lain:

- Program dalam negeri : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kemakmuran, pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.
- Program luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke

pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif menuju perdamaian dunia.

Kendala/ Masalah yang dihadapi:

- Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.
- Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.
- Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.
- Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan.

Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak. Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD. Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.

- Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selamamasa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).

Berakhirnya kekuasaan kabinet:

Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

D. KABINET ALI SASTROAMIJOYO 1 (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)

Setelah mundurnya Kabinet Wilopo, Presiden Soekarno segera mengumumkan pembentukan kabinet baru dan menunjuk Sarmidi Mangunsarkoro (PNI) dan Moh.Roem (Masyumi) sebagai formatur kabinet pada tanggal 15 Juni 1953. Kedua formatur gagal mencapai kesepakatan dan mereka mengembalikan mandat kepada presiden pada tanggal 24 Juni 1953. Mukarto Notowidagdo (PNI) sebagai formatur baru pun gagal. Pada tanggal 18 Juli 1953, presiden menunjuk formatur baru yaitu Mr.Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR). Akhirnya pada tanggal 30 Juli 1953, terbentuklah kabinet baru yang dinamakan Kabinet Ali I atau Kabinet Ali-Wongso. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU. Sedangkan, Masyumi menjadi partai oposisi.

Program – program Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yaitu :

- Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.
- Pembebasan Irian Barat secepatnya.
- Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
- Penyelesaian Pertikaian politik

Hasil :

- Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.
- Membaiknya hubungan dengan Cina
- terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

- Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
- Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI -AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya menteri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.
- Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.
- Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

- Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

NU menarik dukungan dan menteri-mentrinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

E. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955- 3 Maret 1956)

Setelah jatuhnya Kabinet Ali, sebagai gantinya Wakil Presiden Dr. Muh. Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) sebagai formatir kabinet. Kejadian ini baru pertama kali di Indonesia, formatir kabinet ditunjuk oleh Wakil Presiden sebagai akibat dari kepergian Soekarno naik Haji ke Mekkah. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 11 Agustus 1955, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1955 tertanggal 11 Agustus 1955 dan mulai bekerja setelah dilantik tanggal 12 Agustus 1955 dengan dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap adalah merupakan kabinet koalisi yang terdiri atas beberapa partai, bahkan hampir merupakan Kabinet Nasional, sebab jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini berjumlah 13 partai. Tetapi karena masih ada beberapa partai yang sebagai oposisi tidak duduk dalam kabinet seperti PNI dan beberapa partai lainnya, maka kabinet ini termasuk kabinet koalisi.

Program – program Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu :

- Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
- Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
- Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
- Perjuangan pengembalian Irian Barat
- Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif

Hasil :

- Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.
- Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
- Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.
- Terbinanya hubungan baik antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
- Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka tanggal 2 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden, untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Sebenarnya kabinet ini seandainya terus bekerja tidak apa-apa selagi tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen. Tetapi secara Etika politikdemokrasi parlementer, kabinet ini dengan sukarela menyerahkan mandatnya, setelah berhasil melaksanakan Pemilu baik untuk anggota DPR maupun konstitusi

F. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957)

Setelah berakhirnya masa jabatan Kabinet Buharnuddin Harahap, Presiden Soekarno menerapkan cara yang berbeda dalam menunjuk formatur untuk kabinet selanjutnya. Kali ini, Presiden Soekarno tidak menunjuk perseorangan menjadi formatur, tetapi menunjuk partai pemenang pemilu. Nantinya partai tersebut yang akan mengajukan calonnya pada Presiden. Saat itu, PNI sebagai partai pemenang pemilu berhak menjadi formatur dan mereka menunjuk Ali Sastroamijoyo dan Wilopo.

Tetapi pada akhirnya presiden memilih Ali Sastroamijoyo menjadi formatur kabinet yang baru dan kabinet tersebut dinamakan Kabinet Ali Sastroamijoyo II (sering juga disebut Kabinet Ali-Roem-Idham) dengan Ali Sastroamijoyo sebagai ketua kabinet. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU.

Program :

Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut.

- Perjuangan pengembalian Irian Barat
- Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
- Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
- Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
- Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
- Pembatalan KMB (Konferensi Meja Bundar) karena hasil perjanjian ini dianggap lebih menguntungkan Belanda dibanding Indonesia.
- Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif,
- Melaksanakan keputusan KAA.

Hasil :

Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

- Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara,

Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.

- Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.
- Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional. (Gerakan Assaat)
- Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.
- Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Mundurinya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden pada tanggal 14 Maret 1957.

G. Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)

Setelah Kabinet Ali II jatuh, partai-partai politik kembali melakukan politik “dagang sapi” (tawar-menawar antara beberapa

partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi) untuk merebut kedudukan. Akhirnya, Presiden Soekarno menunjuk Ir.Djuanda yang nonpartai untuk membentuk kabinet baru. Kabinet ini dinamakan Kabinet Djuanda dan resmi berdiri tanggal 9 April 1957.

Kabinet dengan komposisi Ir.Djuanda sebagai perdana menteri dan tiga orang wakil yaitu Mr.Hardi, Idham Chalid, dan dr.Leimena ini merupakan zaken kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik.

Program :

Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu,

- Membentuk Dewan Nasional
- Normalisasi keadaan Republik Indonesia
- Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
- Perjuangan pengembalian Irian Jaya
- Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan
- Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.

Hasil :

- Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai

laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.

- Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.
- Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.
- Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.

Kendala/ Masalah yang dihadapi :

- Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.
- Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.
- Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan

Perguruan Cikini saat sedang menghadiri pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.

Berakhirnya kekuasaan kabinet :

Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

Berakhirnya kekuasaan kabinet Djuanda menandakan bahwa demokrasi parlementer telah dianggap gagal. Kegagalan sistem demokrasi parlementer juga ditandai oleh Kegagalan badan konstituante dalam menyusun UUD baru. hal ini disebabkan karena:

1. sikap mementingkan kepentingan golongan atau partai politik yang berada didalam konstituante
2. berbagai peristiwa politik yang merembet pada konflik kepentingan masing-masing kelompok politik ditubuh konstituante.

2.3. Sistem Ekonomi:

Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.

1. Sistem Ekonomi Gunting Syafruddin

Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.

Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.

Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.

2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya :

- Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
- Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
- Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.

- Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.
- Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :

1. Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
2. Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
3. Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
4. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
5. Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
6. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Dampaknya program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para

pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

3. Nasionalisasi De Javasche Bank

Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.

Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.

4. Sistem Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (mentri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah

- Untuk memajukan pengusaha pribumi.
- Agar para pengusaha pribumi Bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
- Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
- Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.
- Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina.

Pelaksanaan kebijakan Ali-Baba,

1. Pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf.
2. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional
3. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab: Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit. Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas. Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.

5. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi:

Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.

- Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
- Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah

pihak.

- Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak.

Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Sukarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Dampaknya : Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.

Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.

RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :

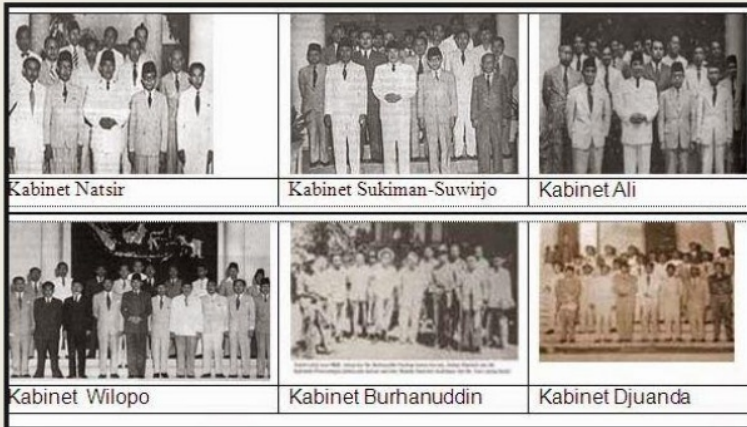
- Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
- Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
- Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakannya masing-masing.

7. Musyawarah Nasional Pembangunan

Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena :

1. Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
2. Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
3. Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.
4. Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia.
5. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.

DARI TAHUN 1950-1959 PEMERINTAHAN SILIH BERGANTI



Gambar :
Kabinet masa Demokrasi Liberal
(www.slideshare.net)

2.4. Pemilu 1955

1. Latar Belakang Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955
Pemilihan umum merupakan salah satu syarat agar sistem pemerintahan yang demokratis berfungsi, Persiapan mendasar pemilu dapat diselesaikan pada masa Pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo I. Kabinet Ali Sastroamijoyo I mempunyai agenda utama untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum yang direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun 1955. Pada tanggal 31 Juli 1954 dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dengan ketuanya Hadikusumo (PNI). Pada tanggal 16 April 1955 Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Pengumuman tersebut mendorong partai-partai untuk meningkatkan kampanyenya hingga sampai ke

pelosok-pelosok desa. Masing-masing partai berusaha untuk mendapatkan suara terbanyak.

2. Pelaksanaan Pemilihan Umum 1955 Diadakannya pemilu diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan. Dengan pemerintahan yang kuat dan stabil diharapkan dapat melaksanakan program-program pembangunan. Pemilu direncanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante (dewan pembuat undang-undang dasar). Setelah diumumkan pelaksanaan pemilu, maka fase kampanye dimulai dengan menyelenggarakan rapat-rapat raksasa. Beberapa partai yang akan mengikuti pemilu, yaitu PNI, Masyumi, PSII, PSI, NU, PKI, PIR, PI Perti, Parkindo, Partai Katolik, PRN, Murba, dan Partai Buruh. Bahkan dari kelompok tentara, yang diprakarsai oleh A.H. Nasution pada tahun 1954 membentuk suatu organisasi atau partai yang memiliki golongan tentara di parlemen. Partai inilah yang dikenal dengan IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia). Wilayah Indonesia dalam pelaksanaan pemilu dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa dengan jumlah pemilih dalam pemilu pertama sekitar 39 juta orang. Penyelenggaraan pemilu pertama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954. Akhirnya pada tanggal 29 September 1955 pemilu dapat terlaksana dengan lancar, sekalipun semula ada ketegangan-ketegangan, namun berikutnya berlangsung dengan aman, tertib, dan disiplin. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1955 diselenggarakan

pemilu untuk memilih anggota konstituante. Suasana pemilihan konstituante ini lebih tenang bila dibandingkan ketika pemilihan anggota DPR.

3. Hasil Pemilihan Umum Tahun 1955 Pemilu yang berhasil dilaksanakan pada tahun 1955 tersebut memunculkan empat partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante. Keempat partai terkemuka yang meraih kusri terbanyak di DPR dan konstituante adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dominasi keempat partai tersebut tampak dari perimbangan kusri di DPR yang terdiri dari 272 kursi. Untuk kursi DPR Masyumi 60 kursi, PNI 58 kursi, NU 47 kursi, PKI 32 kursi, dan partai lain memperebutkan sisa 75 kursi, sedangkan perimbangan kursi konstituante 520 kursi. Masyumi 119 kursi, PNI 112 kursi, NU 91 kursi, PKI 80 kursi, dan partai lainnya memperebutkan sisa 118 kursi. Pelantikan anggota DPR hasil pemilu dilakukan pada tanggal 20 Maret 1956, sedangkan pada anggota Dewan Konstituante dilakukan pada tanggal 10 November 1956.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer,

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

1. Pembuat kebijakan dapat diambil secara cepat karena penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislative mudah terjadi. Hal ini disebabkan kekuasaan pada badan eksekutif dan badan legislative pasti berada pada satu partai atau koalisi partai.

2. Koridor tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas.
3. Pengawasan dari parlemen sangat besar terhadap kabinet yang berkuasa sehingga kabinet menjadi sangat berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

1. Kedudukan badan eksekutif sangat bergantung pada dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
2. Keberlangsungan badan eksekutif tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat dibubarkan oleh parlemen.
3. Sering juga kabinet bisa mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi apabila anggota anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Oleh karena itu pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai maka anggota anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen.
4. Parlemen dapat menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif beda halnya dengan sistem pemerintahan presidensial. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen akan sangat bermanfaat dan menjadi cikal bakal karakter yang penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

memenuhi syarat. Dengan kegagalan konstituante mengambil suatu keputusan, maka sebagian aanggotanya menyatakan tidak akan menghadiri siding konstituante lagi. Sampai tahun 1959 Konstituante tidak pernah berhasil merumuskan UUD baru. Keadaan itu semakin mengguncang situasi politik Indonesia saat itu.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut;

- Pembubaran Konstituante.
- Berlakunya kembali UUD 1945.
- Tidak berlakunya UUDS 1950.

Pembentukan MPRS dan DPAS.

Setelah keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia.

3. RANGKUMAN

1. Politik

Menganut sistem multipartai yang memicu persaingan antarfraksi politik di parlemen untuk saling menjatuhkan.

a. Sistem Pemerintahan

- Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan.
- Kegiatan pemerintahan dijalankan oleh Menteri.

- Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR)
- Sistem pemerintahan yang berlaku adalah Parlementer.

b. Kabinet

- 1). Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)
- 2). Kabinet Sukiman (26 April 1951-23 Februari 1952)
- 3). Kabinet Wilopo (30 Maret 1952-2 Juni 1953)
- 4). Kabinet Ali Sastroamidjojo I (30 Juli 1953-24 Juli 1955)
- 5). Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956)
- 6). Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-14 Maret 1957)
- 7). Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)

c. Sistem Kepartaian

- Diawali dengan Presiden Soekarno mendirikan PNI pada tanggal 23 Agustus 1945.
- Wapres Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dan terbentuklah 10 parpol, yaitu Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, PKRI.
- Sistem kepartaian yang dianut adalah sistem multipartai.

d. Pemilu 1955

Dilaksanakan dalam 2 tahap:

- a) Tahap pertama (29 September 1955) Memilih anggota DPR (parlemen)
- b) Tahap kedua (15 Desember 1955) Memilih anggota konstituante

Partai besar pada Pemilu 1955 PNI, Masyumi, NU, PKI, PSII. Nilai positif yang dapat diambil:

- a) Tingkat partisipasi masyarakat tinggi.
- b) Jumlah orang yang tidak memilih (golput) sedikit.
- c) Kesadaran berdemokrasi

e. Kegagalan Konstituante Menyusun UUD

10 November 1956 Presiden Soekarno melantik 514 anggota Konstituante.

Tugas badan Konstituante Merumuskan UUD baru Masalah utama yang dihadapi Penetapan Dasar Negara Kegagalan Konstituante disebabkan oleh:

- a) Perdebatan yang berlarut-larut.
- b) Adanya perselisihan antarpartai.
- c) Munculnya desakan untuk kembali pada UUD 1945.

30 Mei 1959 Konstituante mengadakan pemungutan suara dan hasilnya mayoritas menghendaki kembali pada UUD 1945. Kedudukan Konstituante terdesak ketika A.H. Nasution mengeluarkan PEPERPU/040/1959 yang berisi larangan adanya kegiatan politik.

Konstituante dibubarkan pada 5 Juli 1959 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

f. Kehidupan Ekonomi

a. Permasalahan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal:

- Permasalahan jangka pendek, yaitu pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup.
- Permasalahan jangka panjang, yaitu penambahan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk

yang rendah.

g.Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi

- 1) Gerakan Banten
- 2) Gunting Syafrudin
- 3) Nasionalisasi De Javasche Bank
- 4) Pembentukan Biro Perancang Negara
- 5) Sistem Ekonomi Ali-Baba

“ Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama ”



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Latihan Essay I

Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokan dengan alternatif penyelesaiannya!

01. Sebutkan 5 partai politik yang muncul pada masa Demokrasi Liberal!

Alternatif penyelesaian

02. Apa tujuan sistem ekonomi program Ali-Baba?!

Alternatif penyelesaian

03. Mengapa Kabinet Burhanuddin Harahap bubar?

Alternatif penyelesaian

04. Jelaskan kelebihan sistem pemerintahan parlementer?

Alternatif penyelesaian

05. Jelaskan isi dekrit presiden Soekarno tahun 1950!

Alternatif penyelesaian



Daftar Isi

Latihan Pilihan Ganda I

1. Dalam Demokrasi Liberal, Presiden berkedudukan sebagai ...

- A kepala pemerintahan
 - B kepala negara
 - C pimpinan eksekutif
 - D pimpinan legislatif
 - E panglima tertinggi
-

2. Dalam Demokrasi Liberal lebih ditekankan pada pengakuan

- A kekuasaan
 - B kekayaan
 - C hak warga negara
 - D kewajiban warga negara
 - E hukum negara
-

3. Konstituante hasil Pemilu 1955 bertugas adalah

- A menyusun GBHN
 - B mengamandemen UUD
 - C menyusun UUD yang baru
 - D memilih Presiden dan Wakil Presiden RI
 - E menyelamatkan sistem demokrasi Indonesia
-

4. Secara umum Demokrasi Liberal *tidak* cocok digunakan bangsa Indonesia karena

- A merupakan tradisi/kebudayaan Barat
 - B parlemen terlalu berkuasa
 - C presiden terlalu lemah
 - D rakyat tidak berkuasa
 - E dominannya politik aliran
-

5. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin dari Partai

- A Masyumi
 - B PNI
 - C Nahdlatul Ulama
 - D PKRI
 - E Permai
-

6. Tindakan berikut *tidak* termasuk dalam upaya menata kehidupan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal, yaitu melaksanakan

- A sistem ekonomi Gerakan Benteng
 - B melaksanakan Konferensi Asia Afrika
 - C menerapkan sistem ekonomi Ali-Baba
 - D nasionalisasi perusahaan asing
 - E *Plan Kasimo*
-

7. Pembicaraan Finek antara Indonesia dan pihak Belanda terjadi pada masa Kabinet

- A Sukiman
- B Natsir
- C Djuanda

- D Wilopo
 - E Burhanuddin Harahap
-

8. Peristiwa Cikini merupakan upaya pembunuhan terhadap

- A PM Moh. Hatta
 - B PM Wilopo
 - C PM Burhanuddin Harahap
 - D PM Sukiman
 - E Presiden Soekarno
-

9. Kendala atau masalah yang dihadapi Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah

- A peristiwa 17 Oktober 1952
 - B muncul konflik PNI dan Masyumi
 - C defisit anggaran yang besar
 - D mutasi di lingkungan pemerintah menimbulkan gejolak
 - E berkobar semangat anti-Tiongkok di masyarakat
-

10. Akibat dari ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Liberal adalah

- A harga-harga sembako naik tidak terkendali
 - B program kabinet tidak berjalan
 - C TNI berpolitik
 - D partai politik dibekukan
 - E Belanda bersiap melakukan agresi
-



Daftar Isi

e-Modul 2019

Direktorat Pembinaan SMA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

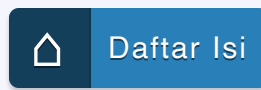
Penilaian Diri I

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	Pertanyaan	Jawaban	
01.	Apakah Anda telah menjelaskan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
02.	Apakah Anda telah mengklasifikasi informasi tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
03.	Apakah Anda telah menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
04.	Apakah Anda telah merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal ?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak
05.	Apakah Anda telah menyajikan hasil rekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal ?	<input type="radio"/> Ya	<input type="radio"/> Tidak

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.



Evaluasi

Soal 1.

Pasca kemerdekaan bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Negara lain, terutama Negara pemenang perang dunia II. Salah satu upaya bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan adalah dengan melaksanakan...

- A. Demokrasi pancasila
- B. Demokrasi terpimpin
- C. Demokrasi liberal
- D. Demokrasi sosialis
- E. Demokrasi modern

Soal 2.

Sistem parlementer pernah digunakan dalam sistem pemerintahan Indonesia pada masa...

- A. Demokrasi liberal
- B. Demokrasi terpimpin
- C. Demokrasi pancasila
- D. Demokrasi campuran
- E. Demokrasi sosialis

Soal 3.

Masa demokrasi liberal berlangsung antara tahun...

- A. 1945 – 1950
- B. 1950 – 1959
- C. 1965 – 1998
- D. 1998 – 2015
- E. 2015 – 2019

Soal 4.

Pada masa demokrasi liberal, bangsa Indonesia menganut sistem pemerintahan

- A. Presidensial
- B. Parlementer
- C. Konstituante
- D. Monarki
- E. Campuran

Soal 5.

Dalam sistem demokrasi liberal pemegang kekuasaan pemerintahan adalah

- A. Sekretaris Negara
- B. Perdana menteri
- C. Wakil presiden
- D. Panglima TNI
- E. Presiden

Soal 6.

Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama pada masa demokrasi liberal pendukung terbesar kabinet adalah partai...

- A. Masyumi
- B. Partindo
- C. PNI
- D. NU
- E. PKI

Soal 7.

Salah satu bentuk perjuangan pembebasan irian barat yang dilakukan kabinet natsir adalah...

- A. Mengadakan perundingan kembali antara Indonesia-belanda pada 4 desember 1950
- B. Meminta bantuan PBB untuk menengahi masalah irian barat
- C. Diadakannya perjanjian new York antara Indonesia-belanda
- D. Mobilisasi umum ke irian barat
- E. Mengeluarkan dwikora

Soal 8.

Pengganti kabinet natsir adalah kabinet sukiman yang merupakan koalisi antara partai...

- A. Masyumi dan partindo
- B. Masyumi dan NU
- C. PNI dan Masyumi
- D. PKI dan masyumi

- E. PKI dan PNI

Soal 9.

Sejak masa kabinet sukiman, politik luar negeri Indonesia menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Adapun politik luar negeri bangsa Indonesia adalah...

- A. Politik dagang sapi
- B. Dualism kekuatan
- C. Politik berdikari
- D. Bebas dan aktif
- E. Politik uang

Soal 10.

Kabinet sukiman mendapat mosi tidak percaya dalam parlemen karena dianggap melanggar...

- A. Politik luar negeri bebas dan aktif
- B. Perintah presiden soekarno
- C. Upaya pengembalian irian barat
- D. Perjanjian KMB
- E. UUD 1945

Soal 11.

Munculnya sentimen anti tionghoa pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjoyo II disebabkan oleh...

- A. Kecemburuan pribumi terhadap kelompok tionghoa yang banyak mengambil alih

perusahaan-perusahaan asing saat dinasionalisasi

- B. Kecemburuan terhadap kebijakan pemerintah yang mengistimewakan pengusaha-pengusaha tionghoa
- C. Sejak masa pergerakan nasional, hubungan antara pengusaha pribumi dan tionghoa selalu tidak harmonis karena persaingan
- D. Orang-orang tionghoa melakukan provokasi dalam kegiatan perdagangan
- E. Orang-orang tionghoa mengambil untung besar dari hasil penjualan

Soal 12.

Kabinet djuanda disebut juga zaken kabinet karena...

- A. Terdapat tiga orang yang menjabat sebagai wakil perdana menteri
- B. Memiliki program utama penyelesaian masalah irian barat
- C. Mendapat dukungan militer dalam menjalankan programnya
- D. Memiliki jumlah menteri yang sangat banyak
- E. Terdiri atas orang-orang yang ahli di bidangnya

Soal 13.

Program kerja kabinet djuanda disebut...

- A. Pancatani
- B. Pancakarya
- C. Saptakarya
- D. Dwikarya
- E. Trikarya

Soal 14.

Berikut ini yang tidak termasuk program kerja kabinet djuanda adalah...

- A. Normalisasi keadaan republic Indonesia
- B. Pembentukan dewan nasional
- C. Nasionalisasi perusahaan asing
- D. Mempergiat pembangunan
- E. Perjuangan irian barat

Soal 15.

Salah satu keberhasilan kabinet djuanda adalah merumuskan dektarasi djuanda yang berisi...

- A. Aturan batas laut teritorial dan laut pedalaman Indonesia
- B. Aturan otonomi pembangunan pusat dengan daerah
- C. Prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif
- D. Hasil perundingan masalah irian barat
- E. Pembatalan perjanjian KMB

Soal 16.

Nilai data uang yang terkena kebijakan gunting syafruddin adalah ... rupiah

- A. 2,5
- B. 3
- C. 3,5
- D. 4
- E. 5

Soal 17.

Kebijakan ekonomi Gerakan Benteng dikeluarkan oleh menteri perdagangan kabinet natsir, yaitu...

- A. Syarifuddin prawiranegara
- B. Sumitro joyohadikusuma
- C. Iskaq tjokrohadisuryo

- D. Jusuf wibisono
- E. Moh. Hatta

Soal 18.

Tujuan utama kebijakan ekonomi gerakan banteng adalah...

- A. Mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional
- B. Memberdayakan jumlah penduduk yang besar sebagai tenaga kerja
- C. Menambah pendapatan Negara untuk membayar utang Negara
- D. Membangun kelas ekonomi baru di parlemen
- E. Mengurangi laju inflasi

Soal 19.

De javasche bank dinasionalisasikan menjadi bank Indonesia dengan fungsinya sebagai...

- A. Bank konsumsi
- B. Bank koperasi
- C. Bank simpan pinjam
- D. Bank sentral
- E. Bank pemerintah

Soal 20.

Kebijakan ekonomi Ali-Baba mengalami kegagalan karena...

- A. Pengusaha pribumi hanya dimanfaatkan oleh pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan modal usaha
- B. Terjadi persaingan antara pengusaha pribumi dengan pengusaha nonpribumi
- C. Pengusaha nonpribumi sering memonopoli perdagangan
- D. Pengusaha nonpribumi sulit berinteraksi dengan pengusaha pribumi
- E. Pengusaha pribumi tidak pandai berdagang

 Hasil Evaluasi

Nilai	Deskripsi

 Daftar Isi

Daftar Pustaka

Usman, A. Rani. 2003. Sejarah Peradaban Aceh. Jakarta: Yayasan Obor _____Indonesia

Praptanto, Eko. 2010. Sejarah Indonesia 3. Jakarta: PT Bina Sumber _____Daya Mipai

Lombard, Denys. 1991. Kerajaan Aceh. Jakarta: Balai Pustaka.

Damayanti, Cahya, dkk. Sejarah Indonesia. Jawa Tengah: Viva Pakarindo.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Sejarah Indonesia. _____Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kurniawan, Budi. 2010. Ensiklopedia Pahlawan Bangsa. Yogyakarta: PT. _____Buku Kita.

Chaidar, Al. 1998. Aceh Bersimbah Darah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.